

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja modal yang bukan kewenangan serta belanja perencanaan yang menimbulkan aset tetap terjadi pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman dari tahun anggaran 2009 sampai tahun 2014 dengan jumlah yang berfluktuasi.
2. Jumlah belanja modal yang bukan kewenangan selama tahun anggaran 2009 sampai tahun 2014 senilai Rp. 221.664.675.777 terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp.26.346.824.110 dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp.195.317.851.667,-
3. Berdasarkan paket pekerjaan dalam enam tahun terakhir paket pekerjaan yang berada pada kelompok belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan jumlah paket terbanyak yaitu 327 paket pekerjaan. Dan jumlah paket pekerjaan terbanyak tersebut terjadi pada tahun 2010 sebanyak 108 paket pekerjaan.
4. Belanja yang menimbulkan aset tetap terjadi selama enam tahun terakhir yaitu senilai Rp. 16.414.758.170. Dimana belanja ini masih dianggarkan pada kelompok belanja barang dan jasa.

5. Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Prasaranaa Jalan, Tata Ruang dan Permukiman dalam perbaikan proses penganggaran adalah melakukan pendekatan aset dalam melakukan penyusunan anggaran khususnya penetapan belanja modal ke dalam DPA dan lebih menekankan prinsip akuntabilitas dalam proses penganggaran kedepannya.

## 1.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, diketahui bahwa selama tahun 2009 sampai tahun 2014 terdapat belanja modal yang bukan kewenangan pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman. Adapun jumlah belanja modal yang bukan kewenangan jumlahnya cukup besar dan material dalam mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan khususnya penyajian nilai aset pada neraca. Jumlah realisasi anggaran belanja modal yang bukan kewenangan terbesar terdapat pada kelompok belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Selain itu terhadap belanja perencanaan yang menimbulkan aset tetap juga terdapat kesalahan dalam proses penganggaran. Dimana selama tahun 2009 sampai tahun 2014 banyak terdapat pekerjaan – pekerjaan yang sifatnya akan menambah aset tetap atau merupakan komponen dalam membentuk aset tetap ternyata dianggarkan pada kelompok belanja barang dan jasa.

Sehingga hasil penelitian memberikan implikasi antara lain : (1) implikasi didalam melakukan proses penganggaran agar memperhatikan substansi sebuah pekerjaan yang akan dilaksanakan, apakah pelaksanaan sebuah pekerjaan

berdampak pada penambahan aset, (2) Implikasi kedua dalam proses penganggaran perlu ditinjau dari sudut pandang ketaatan terhadap peraturan perundangan, pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan (akuntabilitas keuangan) karena dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan dan pengamanan atas aset, (3) Implikasi dalam penataan aset yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memisahkan aset yang menjadi kewenangan dan aset yang bukan kewenangan. Dimana terhadap aset yang bukan kewenangan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hibah kepada Kabupaten/ Kota.

### 1.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. Informan/ Narasumber dalam penelitian ini hanya berada di lingkungan internal Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman sehingga informasi juga masih terbatas atau belum efektif. Analisis pada proses penganggaran hanya dilakukan di dalam lingkungan SKPD terpilih saja sementara dalam proses penganggaran juga melibatkan TAPD dan Badan Anggaran DPRD yang berada di luar SKPD.
2. Penelitian ini juga masih mengandalkan data dari satu SKPD saja. Sementara untuk komponen belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ( SKPD yang melaksanakan tugas – tugas ke PU an ) juga dimiliki oleh SKPD lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

#### 1.4 Saran

1. Memperbanyak jumlah informan/narasumber dalam proses penganggaran dan pengelolaan aset seperti TAPD, Biro Pengelolaan Aset Daerah sehingga informasi yang diperoleh lebih rinci dan lebih lengkap.
2. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan menambah jumlah objek penelitian dan SKPD sejenis serta juga mengaitkan dengan isu – isu penting yang terjadi pada tahun-tahun dimana persentase tertinggi belanja modal bukan kewenangan terjadi.

